

GERAKAN FILANTROPI MUHAMMADIYAH DAN DAKWAH YANG MENCERAHKAN

Hilman Latief

Yang selalu menarik dari kajian pemikiran keislaman adalah mencermati keselarasan, kemiripan, dan kontinuitas sebuah gagasan di masa lalu dengan di masa sekarang serta nuansa perbedaannya. Sebuah gagasan keislaman yang lahir di abad ini, sangat boleh jadi memiliki similaritas, dan dalam kadar tertentu, memiliki rentetan genealogi intelektual dengan gagasan lainnya di masa lalu. Sebuah gagasan yang berkembang di suatu negeri, sangat mungkin pula memiliki kesamaan dengan apa yang berkembang di negeri lainnya, baik di waktu yang sama atau zaman yang berbeda. Karena itulah, sebuah gagasan yang sama dapat lahir dan tumbuh dari rahim sosial-intelektual yang berbeda.

“Islam Berkemajuan” adalah sebuah gagasan, pikiran, dan cita-cita. Di Indonesia telah menjadi sebuah terma generik yang tengah dan terus digaungkan oleh—dan oleh publik diidentikkan dengan—Persyarikatan Muhammadiyah. Islam Berkemajuan merupakan penyederhanaan dari konsep formal dari dokumen resmi Muhammadiyah tentang perlunya menerjemahkan nilai-nilai Islam untuk Indonesia yang Berkemajuan. Artinya, dalam merumuskan keislamannya, para pemimpin dan warga Muhammadiyah menginginkan atau setidaknya mencita-citakan bahwa dengan berislam atau menerapkan Islam di Indonesia, bangsa ini menjadi maju, bukan sebaliknya. Karena itulah, di kalangan warga atau aktivis Muhammadiyah sendiri, Islam Berkemajuan menjadi subjek interpretasi yang luas atau, meminjam istilah Mohammed Arkoun, menjadi “korpus terbuka” () yang siap untuk dikaji ulang dan bahkan diperdebatkan ulang arahnya.

Lantas, secara ontologis dan epistemologis apa yang disebut “Islam Berkemajuan”? Atau, secara lebih objektif bisa kita rumuskan pertanyaan siapakah Muslim Berkemajuan itu dan apa yang menjadi ciri-cirinya dilihat dari konsep-konsep besar yang ditawarkannya maupun dari aksi-aksi yang dilakukannya? Memaknai Islam Berkemajuan tentu cukup pelik dan sekaligus menantang. Karena banyak padanan kata dan konsep yang bisa disematkan terhadap istilah tersebut. Muhammadiyah sendiri, sejak awal berdirinya kerap disebut organisasi “modernis” dan atau “reformis”. Artinya, Muhammadiyah memiliki orientasi untuk menjadi modern dan baru pada masanya. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang mencari kebaruan yang dirumuskan dalam gagasan yang diusungnya dan diwujudkan dalam aksi yang dilakukannya. Sejauh ini, literatur tentang tentang Islam di Indonesia banyak mengidentikkan Muhammadiyah sebagai modernis-reformis yang secara diametral dihadapkan dengan tradisional. Dalam tataran aksiologis, konsep modernis-reformis dari Muhammadiyah dilihat dari pola gerakan sosial organisasi ini yang menitik beratkan kepada penerapan atau pengadopsian model-model pendidikan modern ala Barat dan juga aksi-aksi sosialnya. Meskipun model pemaknaan tersebut tidak salah, namun masih banyak hal yang bisa dirumuskan menjadi pertanyaan konseptual, apa makna modern yang ada dalam Muhammadiyah dalam konteks sosial-ekonomi dan politik dewasa ini ketika masyarakat terus berubah? Apa nilai-nilai kemajuan yang intrinsik yang menjadi ruh gerakan persyarikatan saat ini? Siapakah yang saat ini lebih tepat disebut dengan Muslim (yang berfikiran) berkemajuan?

Karena itu, sekali lagi, memaknai Islam Berkemajuan sama kompleksnya dengan memaknai istilah lainnya yang disematkan dengan Islam, seperti Islam Nusantara atau Islam Liberal atau Islam Fundamental, dan sebagainya. Dalam banyak kasus, konsep “Islam fundamentalis” atau Muslim fundamentalis, misalnya, pernah sangat populer dalam berbagai literatur. Namun, kini banyak varian

yang dimunculkan oleh para pengamat untuk konsep ini, seperti radikal, konservatif, atau garis keras dan lain-lain. Kompetistitas pemaknaan ini dapat kita lihat pula ketika beberapa tahun lalu terbit beberapa buku yang menarik perhatian publik yang memperdebatkan istilah yang dilahirkan, seperti "Islam Progresif" yang dirumuskan ulang oleh Omid Safi dan "Islam Liberal" yang ditulis oleh Charles Kurzman.

Omid Safi, menulis sebuah buku yang sangat menarik berjudul *Progressive Muslim: On Justice, Gender and Pluralism* (2003). Dalam merumuskan konsep Muslim progresif atau dalam Bahasa Indonesia bisa juga disepadankan dengan Muslim yang (berfikiran dan bertindak) maju atau berkemajuan, Omid Safi mengangkat tiga isu besar yaitu masalah keadilan, isu kesetaraan gender dan pluralisme. Ia mengatakan bahwa secara tradisional, tiga masalah di atas menjadi bagian dari hampir seluruh wacana keagamaan di dunia, termasuk di kalangan Muslim. Namun dalam pengamatannya, para pemikir Muslim, termasuk para ulama, baru belakangan bicara masalah ini dibanding dengan agamawan dan pemikir dari kaum Yahudi, Nasrani, Hindu dan bahkan kelompok sekular. Kecuali tentang keadilan, erudisi yang mendalam dan eksploratif terhadap kesejajaran keadilan gender dan pluralisme tidak begitu kuat dalam khasanah tradisional Islam.

Omid Safi memberikan catatan menarik tentang konsep "Muslim progresif" dalam konteks saat ini dan membedakannya dengan "Muslim modernis" yang muncul dan tumbuh pada abad ke sembilan belas dan berkembang pada abad kedua puluh. Omid Safi mengaitkan konsep progresif maupun modernis dengan sikap atau respons Muslim terhadap dunia atau peradaban yang dikembangkan dan diproagandakan oleh Barat. Bila dulu, kelompok Islam modernis dan reformis diidentikan dengan sekelompok orang yang berikap adaptif dan terbuka terhadap budaya dan peradaban Barat yang dianggap lebih maju, namun tidak demikian halnya dengan progresif. Karena menjadi progresif bukanlah bersikap akomodatif semata-mata, dan tidak pula sekedar keberanian mengadopsi dan bahkan menduplikasi karakter dan cita-cita peradaban Barat. Menjadi maju atau progresif dalam konteks ini adalah keberanian memberikan kritik terhadap modernitas dan kemajuan peradaban Barat sama persisnya dengan keberanian memberikan kritik terhadap kondisi aktual masyarakat Muslim yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam. Omid Safi mencatat demikian: *"Indeed this is one important way in which progressive Muslim differ from the host of "modernist" Muslim thinkers in the late-nineteenth and much of the twentieth century. We no longer look to the prevalent notion of Western modernity as something to be imitated and duplicated in toto. In fact, we direct our critique just as much to the West as to Muslim societies"* (Safi 2003: 4).

Dalam konteks lain, ia menegaskan bahwa menjadi Muslim progresif tidak ada urusannya dengan keterbukaan terhadap kemoderenan semata-mata, melainkan juga kemampuan untuk melawan arogansi modernitas (*being a progressive Muslim also means being mindful and critical of the arrogance of modernity*) (Ibid). Karena itulah, pemaknaan terhadap Muslim progresif lebih identik dengan komitmen yang utuh dari seorang Muslim dalam memperjuangkan nilai dan gagasan keadilan universal (*a relentless striving towards a universal notion of justice*) dan berupaya untuk tidak membiarkan kesejahteraan, kebajikan dan kehormatan seseorang terampas oleh orang lain (Safi 2003: 3). Muhammadiyah sendiri selama ini kerap disebut para pengamat sebagai sebuah gerakan Islam modernis dan reformis, yang dalam aksi-aksinya di berbagai bidang, khususnya sosial, pendidikan dan kesehatan lebih terbuka dengan metodologi yang berkembang di dunia Barat. Namun, kini istilah modernis dan reformis justru jarang digunakan dari dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Berbagai dokumen resmi

dilahirkan dalam forum-forum permusyawaratan justru menggunakan istilah yang mirip, meskipun tidak sama, dengan istilah progresif Muslim, yaitu gerakan Islam yang berkemajuan.

Gerakan Dakwah Berkemajuan dan Mencerahkan di Era Disrupsi

Saya akan menggunakan eksposisi yang diampaikan oleh Omid Safi untuk mengukur sejauh mana sebetulnya interpretasi Islam ala Muhammadiyah, di masa lalu dan sekarang, memiliki keselarasan dengan Muslim progresif saat ini? Atau, apa yang menjadi kelebihan dari konsep Islam untuk Indonesia berkemajuan yang ditawarkan Muhammadiyah bila dibandingkan dengan rumusan Omid Safi tentang Islam progresif? Dalam bukunya, sekali lagi, Omid Safi menawarkan tiga isu besar yang menjadi tolok ukur bagaimana konsep Islam yang progresif, yaitu response Muslim terhadap masalah keadilan sosial, isu kesetaraan jender, dan pluralisme. Artinya, kemajuan diukur dari seberapa jauh Kaum Muslim mampu memberikan interpretasi-interpretasi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial, kesetaraan atau keadilan jender dan penghargaan terhadap kemajemukan.

Tentu, tidak sedikit literatur yang menunjukkan bagaimana gerakan Islam modernis seperti Muhammadiyah memiliki banyak dimensi progresifnya, dan pada saat yang sama kental pula dimensi puritannya khususnya untuk masalah ibadah keagamaan. Beberapa dokumen dan pengalaman sejarah yang dialami oleh Muhammadiyah menunjukkan bahwa Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan mendorong terwujudnya bangsa atau negara yang baik dan sejahtera serta serta dirahmati menjadi rujukan Muhammadiyah. Keadilan sosial Tentang keadilan misalnya, sejak awal berdirinya Muhammadiyah.

Beberapa tahun lalu (2012), ketika ujian disertasi di Universitas Utrecht Belanda Belanda, saya ditanya oleh seorang penguji, yaitu Prof. Kareel Steenbrink, seorang Guru Besar di bidang sejarah agama dan teologi dan juga Indonesianis yang sudah sangat akrab dengan khasanah Islam di Indonesia. Pertanyaannya kira-kira begini: menurut Anda, mana yang lebih dominan dalam aksi filantropi Muhammadiyah, apakah dimensi sosialnya atautah dakwahnya? Dengan kata lain, Prof. Steenbrink ingin mengklarifikasi dan menanyakan manakah misi yang paling utama dalam Muhammadiyah: misi agama (misionaristik) atau misi sosial.

Pertanyaan ini agak *tricky* dan sempat membuat saya termenung sejenak sebelum menjawabnya. Palsanya ini seperti menentukan mana yang lebih dahulu ada, telur atau ayam. Namun, tentu pertanyaan ini perlu jawaban, penjelasan atau klarifikasi. Pada waktu itu saya mencoba memperkuat argumen bahwa dakwah Muhammadiyah adalah dakwah sosial. Gerakan sosial Muhammadiyah adalah bagian dakwah Muhammadiyah, dan misi sosial dan misi dakwah adalah menyatu (*embodied*). Dalam konteks inilah konsep dakwah Islam yang mencerahkan dapat kita rumuskan. Mencerahkan dalam bahasa lain bisa disebut dengan “enlightening” yang membuka wawasan dan memiliki basis pengetahuan yang kuat dan semangat menjunjung tinggi kemanusiaan.

Memang kedengarannya seperti latah, mengaitkan Muhammadiyah dengan era disrupsi yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Orang mungkin bertanya-tanya pula: apa hubungan gerakan Islam modernis yang usianya lebih dari satu abad ini dengan era teknologi digital? Bukankah Muhammadiyah tambah lama tambah besar, amal usaha nya semakin baik dan banyak, dan asset yang dimilikinya semakin sulit hitung? Lagi pula, bukankah kader-kader Muhammadiyah masih banyak dan semakin terdidik yang tentunya akan siap menghadapi situasi bangsa ini di masa depan?

Saya kira, ada banyak klaim tentang keberhasilan dan karya Muhammadiyah yang bisa kita susun dalam daftar yang sangat panjang. Tapi, tak bisa dipungkiri pula, ada daftar panjang masalah yang dihadapi oleh Muhammadiyah sebagai gerakan sipil Islam yang mengelola ribuan amal usaha. Yang perlu kita lebih hati-hati dan berfikir lebih cermat adalah sudah siapkah Muhammadiyah dan amal-amal usahanya masih eksis untuk 50-100 tahun ke depan? Apa yang ingin dicapai? Apakah yang terjadi hari ini di sekitar kita pernah menjadi diskursus Muhammadiyah sebelumnya, seperti fenomena lahirnya *platform* bisnis, sosial maupun sosial-bisnis seperti Gojek, BukaLapak, Traveloka, KitaBisa dan berbagai bentuk teknologi finansial yang sekarang mendarah daging di sebagian besar masyarakat Indonesia, tak terkecuali kaum Muslim secara umum, dan warga Muhammadiyah secara khusus?

Banyak cerita di luar sana bahwa belakangan ini perusahaan-perusahaan raksasa sempat goyah, hampir bangkrut, dan bahkan sudah menghilang dari arena persaingan karena tidak sanggup berhadapan dengan situasi yang berubah secara tiba-tiba dan tidak diantisipasi dengan baik. Kita dengar sebuah perusahaan transportasi di Jakarta *oleng* ketika platform transportasi *on line* menjadi magnet yang kuat bagi banyak penumpang. Banyak cerita warung yang tidak bisa bertahan atau penjual makanan yang hampir tutup dan mau tidak mau memberikan layanan *on line* bagi langganannya mereka yang sudah banyak malas keluar rumah. Tak sedikit pula pegawai dengan keterampilan rendah yang diberhentikan atau pensiun dini di banyak perusahaan atau kantor karena tempat mereka bekerja sudah mengadopsi teknologi baru. Sebaliknya, kita dengar nama dan bendera bisnis baru yang berkibar di Indonesia, yang ternyata bukan sebuah pabrik atau produsen barang tertentu, melainkan sebuah platform bisnis berbasis digital.

Bila perusahaan-perusahaan besar dengan manajemen modern dan SDM terlatih harus goyah di era disrupsi ini, apakah fenomena yang sama akan dialami oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan dengan kerja-kerja sosial dengan cakupan yang luas, seberapa lama dan konsisten Muhammadiyah sebagai organisasi mampu membiayai dan memperkuat jaringan kerjanya di era saat ini? Secara lebih khusus lagi, bagaimana Muhammadiyah mampu menjaga konsistensi dan melestarikan kekuatan *ta'awun* (tolong menolong) dan kepedulian kolektif yang saat ini menjadi nilai utama dalam masyarakat yang terus berubah?

Semangat Bergerak Minus Teknologi

Dari dulu, Persyarikatan Muhammadiyah bisa eksis karena modal dasar yang dimilikinya, seperti: a) komitmen keagamaan yang kuat yang melandasi ethos pergerakan kadernya; b) sumber daya manusia terdidik yang senantiasa terus menerus mau mengikuti perubahan dan merespons perubahan zaman; c) jiwa kerelawanan dan kesadaran kolektif yang kuat dari aktivisnya dengan menproyeksikan energi dan cita-cita sosial mereka melalui persyarikatan. Kita bisa melihat, kekuatan komitmen kader-kader yang berada di tiap tingkatan yang bersedia menjadi relawan untuk mengurus organisasi, mulai dari Ranting dan Cabang hingga Daerah (Kota/Kabupaten), Wilayah (Provinsi) dan Pusat. Semangat *ta'awun* (saling menopang dan saling membantu) yang dipelopori tokoh-tokoh *genuine* dan anggota masyarakat yang menjadi kader Muhammadiyah di berbagai daerah telah berperan penting untuk memperkuat dan merevitalisasi keberadaan persyarikatan dari waktu ke waktu.

Tapi, waktu terus berubah. Upaya untuk meningkatkan kapasitas persyarikatan dan peran-peran anggota dan simpatisan terus dilakukan, termasuk di dunia kewirausahaan (*entrepreneurship*). Meski sebagian besar aktivis Muhammadiyah bekerja sebagai pegawai (termasuk menjadi PNS), upaya untuk mendorong wirausaha dalam program-program persyarikatan begitu kuat di "akar rumput". Upaya

untuk memperkuat amal usaha dilakukan oleh persyarikatan, dan langkah untuk meningkatkan kewirausahaan tak pernah berhenti untuk digelorakan. Seiring dengan itu, dalam beberapa diskusi yang dilakukan dengan pegiat Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah di tingkat daerah atau cabang, sering muncul pertanyaan kemungkinan dibangunnya usaha. Banyak sekali usaha mikro atau produk-produk industri rumahan yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok usaha Aisyiyah dan Muhammadiyah. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah bagaimana lahan untuk membuka tokonya, kemana produksi industri rumahan kelompok usaha Aisyiyah dan Muhammadiyah akan dipasarkan, dan siapa yang akan menjadi mitra dalam menjalankan usaha, dan lain-lain. Dapatkah produk industri rumahan Aisyiyah dan Muhammadiyah mengintervensi pasar yang lebih luas, ataukah pasarnya masih di wilayah internal persyarikatan. Usaha-usaha mikro yang didampingi oleh majelis atau lembaga yang melakukan pendampingan ekonomi untuk pedagang, petani, nelayan, dan sebagainya kerap berhadapan dengan masalah proses “hilirisasi” produk-produk industri rumahan.

Dibalik banyak kesulitan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat sipil dalam membuka akses pasar, ternyata telah terjadi “revolusi lapak dagangan” yang dipelopori kaum muda dan kelompok masyarakat sadar teknologi. Penetrasi dan ekspansi bisnis mereka dalam bentuk *platform* digital telah menjadi gaya hidup baru sesuai dengan karakteristik masyarakat milenial dengan budaya digital mereka. Kini pasar yang dibuka adalah pasar digital, dan lapak yang dibangun adalah lapak *virtual*, dimana orang tidak lagi harus membuka toko *off line* melainkan juga membuka transaksi-transaksi *on line*. Gagasan utama dalam platform digital di era disrupsi ini tentang memperkuat dan merekonstruksi konsep “*sharing economy*” dan pada saat yang bersamaan membangun tradisi “*sharing opportunity*”. Prinsipnya adalah maju bersama-sama dan untung bersama-sama. Kualitas produk yang ditawarkan seiring sejalan dengan kualitas layanan yang diberikan: singkat, mudah, cepat, dan pasti.

Gerakan Ta’awun Kolektif

Fenomena di atas adalah contoh perkembangan dan revolusi budaya yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini yang barangkali dapat kita refleksikan ke dalam gerakan *ta’awun* yang menjadi tema utama gerakan persyarikatan Muhammadiyah era saat ini yang dikenal dengan era Revolusi Industri 4.0. Saat ini, diskursus yang berkembang bukan saja bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam atau meningkatkan sumberdaya manusia, melainkan juga bagaimana mengelola data. Peran strategis sebuah gerakan sosial, termasuk gerakan keagamaan akan ditumpukan pada kemampuan mengelola dan memanfaatkan data yang dimilikinya efektif mungkin, termasuk untuk tujuan ekonomi. Pengelolaan data yang kuat menjadi modal bagi sebuah organisasi bisnis untuk mempengaruhi pasar dan bahkan untuk menciptakan pasar. Begitu pula bagi sebuah organisasi sosial, pengelolaan data yang baik akan mendorong lahirnya sebuah kebijakan yang memiliki capaian lebih terukur dan tepat sasaran.

Muhammadiyah dan jutaan anggota dan simpatisannya adalah sebuah pasar potensial. Ribuan amal usaha yang dimilikinya juga merupakan pasar empuk yang sebisa mungkin harus “diintervensi” oleh para pebisnis. Tak heran, banyak kalangan pebisnis yang ingin bermitra dengan Muhammadiyah, karena jaringan yang dimilikinya. Dengan kata lain, anggota dan para simpatisan Muhammadiyah akan menjadi pasar khusus bagi sebuah produk bisnis. Tentu tidak semua pebisnis hanya ingin memanfaatkan Muhammadiyah sebagai pasar. Tidak sedikit yang secara ideologis tertarik dengan sepak terjang Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah lama bergelut di bidang sosial, budaya, keagamaan, pendidikan dan tentu saja ekonomi.

Gerakan *ta'awun* tentunya bersifat kolektif. *Ta'awun* menyarakatkan kerjasama, keterbukaan, dan perubahan untuk maju bersama. Gerakan *ta'awun* juga bermakna bahwa tidak ada perubahan yang lebih efektif untuk dilakukan selain bekerja-bersama, baik antara kelompok masyarakat yang sama-sama kuat untuk meraih sebuah cita-cita besar ataupun menyelesaikan masalah-masalah besar, antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah agar yang satu bisa menguatkan yang lain, atau antara sesama yang lemah untuk saling menguatkan dan bangkit bersama-sama. Isu-isu besar tentang krisis lingkungan hidup, kartel bisnis, korupsi, kerawanan ketahanan pangan dan sebagainya tentu tidak bisa perjuangkan sendirian oleh Muhammadiyah. Harus terjadi kerjasama yang kuat yang dibangun oleh Muhammadiyah dengan kelompok masyarakat sipil lainnya. Begitu juga dengan masalah krisis kemanusiaan ataupun penanggulangan kejadian bencana yang frekuensinya cukup tinggi di Indonesia, mensyaratkan aktivis persyarikatan Muhammadiyah untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan berbagai organisasi kemanusiaan lainnya. Bergabungnya Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari (Humanitarian Forum Indonesia) adalah sebuah langkah yang sangat tepat.

Agenda pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi rujukan masyarakat dunia, termasuk pemerintah Indonesia dan peryarikatan Muhammadiyah secara khusus, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan potensi lingkungan, juga membutuhkan kerja-kerja kolektif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta (perusahaan-perusahaan). Apalagi ketika Indonesia masih memiliki kesenjangan wilayah yang cukup besar dalam berbagai bidang, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sarana air bersih, dan pekerjaan yang layak dan lain-lain. Tentu, konsep *ta'awun* yang perlu penerjemahan yang lebih luas dan strategis. Bahkan *ta'awun* secara kolektif bukan hanya membutuhkan kemauan yang kuat tapi juga kemampuan membaca data dan menalar strategi. Sebagai organisasi masyarakat sipil, peran Muhammadiyah sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan mencapai tujuan tersebut mustahil dilakukan tanpa bekerjasama dengan banyak pihak. Kontribusi dari kerja-kerja Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan penyediaan pekerjaan yang layak, jumlahnya sudah sangat luar biasa besar. Namun, jumlah besar itu perlu pengukuran sehingga dapat terumuskan kontribusi kualitatif dan kuantitatifnya agar dalam tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan mutu kerjanya dan diprioritaskan agenda strategisnya.

Gerakan *ta'awun* secara kolektif dalam persyarikatan Muhammadiyah nampaknya tidak bisa dilepaskan dari tradisi filantropi yang sudah bertahan dan terus terpelihara selama lebih dari seratus tahun. Kekuatan kolektif berbasis komunitas menjadi andalan warga Muhammadiyah untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Konsistensi berzakat dan berinfaq warga Muhammadiyah perlu ditransformasikan dalam bentuk sebuah gelombang besar gerakan filantropi dengan tata kelola yang rapih, dan tentunya metode yang canggih. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, gerakan filantropi Muhammadiyah mau tidak mau harus memasuki dunia baru, yaitu adopsi yang menyeluruh terhadap teknologi pengelolaan keuangan yang memungkinkan persyarikatan untuk mengukur dan memproyeksikan kemampuan finansialnya. Tentu, banyak pembanding dari para "pemain baru" filantropi Islam saat ini yang sudah lebih maju dan jauh lebih canggih dan inovatif dari Muhammadiyah dalam mendorong masyarakat umum berkontribusi dana zakat dan infak. Artinya, bila persyarikatan Muhammadiyah masih secara konsisten berjalan, tidak sedikit lembaga baru yang sudah melakukan lompatan besar dalam waktu yang singkat yang dapat membuat warga Muhammadiyah

terkaget-kaget. Seperti kagetnya sebuah perusahaan besar yang sudah berusia lama dengan kemunculan pemain-pemain baru dalam sebuah sektor bisnis.

Bila dahulu keberadaan amal usaha Persyarikatan dapat menjadi pengikat warga untuk dapat ber-*ta'awun* secara kolektif, saat ini gerakan kolektif *ta'awun* masih perlu direkatkan dengan kemampuan menggunakan sistem teknologi digital yang terbuka dan memberikan ruang bagi lebih banyak warga untuk berbagi kesempatan, berbagi potensi, berbagi kapasitas, berbagi keahlian. Dengan kata lain, di era disrupsi saat ini Persyarikatan Muhammadiyah harus bertransformasi menjadi sebuah *platform* gerakan besar yang mengakomodasi lebih banyak keterlibatan anak bangsa yang cinta perubahan.